

SALINAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 44 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, dan sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6, Pemerintah Daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan serta mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka guna menjamin kesinambungan kebijakan dan strategi perlu menyusun Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Pekalongan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten DaerahTingkatII Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembagunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 61);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/ PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
15. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengurangan Sampah Melalui Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik dan Wadah/Kemasan Makanan dan Minuman di Destinasi Ekowisata Petungkriyono (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
6. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Dinas PERKIM DAN LH adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang perumahan, pemukiman dan lingkungan hidup berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
7. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
8. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
9. Sumber Sampah adalah asal timbunan sampah.
10. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
11. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Daerah yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini, adalah sebagai pedoman dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Pekalongan.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini, adalah untuk:

- a. mewujudkan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga secara terencana, terpadu dan terprogram dalam rangka mewujudkan Kabupaten Pekalongan Bebas Sampah Tahun 2025; dan
- b. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Jakstrada.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. arah Jakstrada; dan
- b. penyelenggaraan Jakstrada.

BAB III
ARAH JAKSTRADA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Jakstrada memuat:

- a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
- b. strategi, program, dan target pengurangan serta penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua
Arah Kebijakan Daerah dalam Pengurangan dan
Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga

Pasal 6

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi peningkatan kinerja di bidang:
- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:
- a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. daur ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:
- a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga
Strategi, Target, dan Program Daerah dalam Pengurangan
dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 7

Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
- c. penguatan komitmen Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. pembentukan sistem informasi;
- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
- h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 8

Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
- c. penguatan komitmen Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. pembentukan sistem informasi;

- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
- h. penguatan penegakan hukum;
- i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;
- j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 9

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bupati ini, dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bupati ini, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pekalongan.
- (2) Penyusunan Jakstrada kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Jakstranas dan Jakstrada Provinsi Jawa Tengah.

Bagian Kedua Jakstrada

Pasal 12

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Bupati sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk:
 - a. melaksanakan Jakstrada dan mengoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada; dan
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Teknis pelaksanaan, koordinasi penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup sub urusan persampahan, yaitu Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup.

Pasal 13

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur dengan indikator:
 - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.

- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.

Pasal 14

- (1) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup sub urusan persampahan, yaitu Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, melalui:
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati dan digunakan sebagai dasar perbaikan/*review* Jakstrada.

BAB V PENDANAAN

Pasal 15

Penyelenggaraan Jakstrada sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan; dan
- d. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Bupati bertanggung jawab atas ketersediaan lahan, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 22 Oktober 2018

BUPATI PEKALONGAN,
ttd
ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 22 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2018 NOMOR 45

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



AGUS PRANOTO, SH, MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670914 199703 1 005

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 44 TAHUN 2018
TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH KABUPATEN
PEKALONGAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH
TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA KABUPATEN PEKALONGAN

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Pekalongan

Target Pengurangan									
No	Indikator	Tahun							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (Ton/Tahun)	130.225	130.811	131.399	131.991	132.585	133.181	133.781	134.383
2	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
3	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Pekalongan (Ton/Tahun)	23.440	26.162	28.908	31.678	34.472	35.959	37.459	40.315

I. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Pekalongan

Target Penanganan									
No	Indikator	Tahun							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (Ton/Tahun)	130.225	130.811	131.399	131.991	132.585	133.181	133.781	134.383
2	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
3	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Pekalongan (Ton/Tahun)	95.064	104.649	98.550	97.673	96.787	95.890	94.984	94.068

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 22 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2018 NOMOR 45

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



AGUS PRANOTO, SH, MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670914 199703 1 005

BUPATI PEKALONGAN,
ttd
ASIP KHOLBIHI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 44 TAHUN 2018
TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH KABUPATEN
PEKALONGAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH
TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
TAHUN 2018 - 2025

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>
1	Peningkatan kinerja pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	a. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	1) Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang tepat guna (best practicable technology) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga											

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			a) Studi Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	dokumen			1						DINAS PERKIM LH & BAPPEDA LITBANG	DPU PR , DINKES, DISKOPERINDAG UMKM
			2) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga meliputi :											
			a) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	dokumen		1	1	1	1	1	1	1	DINAS PERKIM LH & BAPPEDA LITBANG	DPU PR ,PMD P3A DAN PPKB, DINKOPRINDAG UMKM, PMD P3A DAN PPKB, BAG HUKUM, SATPOL PP
			b) Pendaauran ulang Sampah Rumah	dokumen		1	1	1	1	1	1	1	DINAS PERKIM LH &	DPU PR ,PMD P3A DAN PPKB, DINKOPRINDAG UMKM, PMD P3A

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga										BAPPEDA LITBANG	DAN PPKB, BAG HUKUM, SATPOL PP
			c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	dokumen		1	1	1	1	1	1	1	DINAS PERKIM LH & BAPPEDA LITBANG	DPU PR, PMD P3A DAN PPKB, DINKOPRINDAG UMKM, PMD P3A DAN PPKB, BAG HUKUM, SATPOL PP
			3). Penyusunan dan kaji ulang standar prosedur operasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga meliputi :	dokumen										
			a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	DINAS PERKIM LH & BAPPEDA LITBANG	DPU PR, PMD P3A DAN PPKB, DINKOPRINDAG UMKM, PMD P3A DAN PPKB, BAG HUKUM, SATPOL PP

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Tangga											
			b) Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	DINAS PERKIM LH & BAPPEDA LITBANG	DPU PR ,PMD P3A DAN PPKB, DINKOPRINDAG UMKM, PMD P3A DAN PPKB, BAG HUKUM, SATPOL PP
			c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	DINAS PERKIM LH & BAPPEDA LITBANG	DPU PR ,PMD P3A DAN PPKB, DINKOPRINDAG UMKM, PMD P3A DAN PPKB, BAG HUKUM, SATPOL PP
			4) Penetapan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga											

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	DINAS PERKIM LH	DPU PR ,PMD P3A DAN PPKB, DINKOPRINDAG UMKM, PMD P3A DAN PPKB, BAG HUKUM, SATPOL PP
			b) Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	DINAS PERKIM LH	DPU PR ,PMD P3A DAN PPKB, DINKOPRINDAG UMKM, PMD P3A DAN PPKB, BAG HUKUM, SATPOL PP
			c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	DINAS PERKIM LH	DPU PR ,PMD P3A DAN PPKB, DINKOPRINDAG UMKM, PMD P3A DAN PPKB, BAG HUKUM, SATPOL PP
			5) Penyusunan peraturan-peraturan bidang pengelolaan sampah											

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			a) Penyusunan Perda Pengelolaan Sampah	dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			b) Penyusunan jakstrada pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PERKIM LH & BAPPEDA LITBANG	DPU PR ,PMD P3A DAN PPKB,DINDIKBUD, DINKOPRINDAG UMKM, PMD P3A DAN PPKB, BAG HUKUM, SATPOL PP
			c) Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan sampah	dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	DINAS PERKIM LH & BAPPEDA LITBANG	DPU PR ,PMD P3A DAN PPKB,DINDIKBUD, DINKOPRINDAG UMKM, PMD P3A DAN PPKB, BAG HUKUM, SATPOL PP
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat,	1) Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama atau kerja sama dalam :										DINAS PERKIM LH	

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Pemerintah Daerah dan Desa	a) Pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	DINAS PERKIM LH & PMD P3A DAN PPKB	BAPPEDALITBANG, SETWAN, DINKES, DINDIKBUD, BPKD, DPU PR, BAG HUKUM, SATPOL PP
			b) Anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	DINAS PERKIM LH & BPKD	BAPPEDALITBANG, SETWAN, DINKES, DINDIKBUD, DPU PR, BAG HUKUM, SATPOL PP

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga											
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah di daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di daerah	pertemuan	1	1	1	1	1	1	1	1	DINAS PERKIM LH & SETWAN	BAPPEDALITBANG, SETWAN, BPKD, DPU PR, BAG HUKUM, SATPOL PP
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan,	1) Advokasi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis											

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		kelembagaan dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Sampah Rumah Tangga kepada :												
			a) Pemerintah kabupaten	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DINAS PERKIM LH, SETWAN, & BAG HUKUM	BAPPEDALITBANG, BPKD , DPU PR SATPOL PP
			b) DPRD Kabupaten	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DINAS PERKIM LH & SETWAN, BAG HUKUM	BAPPEDALITBANG, BPKD , DPU PR SATPOL PP
			2) Pelaksanaan Training of Trainer pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DINAS PERKIM LH	BAPPEDALITBANG, DINKES, DPU TARU, PMD P3A DAN PPKB ,DINPERINDAGKOP UKM , DINDIKBUD, BAG HUKUM, SATPOL PP

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			3) Pembentukan bank sampah induk	kegiatan	1								DINAS PERKIM LH	BAPPEDALITBANG, BPKD
		e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring kabupaten data operasional bank sampah dan TPS3R yang diintegrasikan dengan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) di Kabupaten	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DINAS PERKIM LH	BAPPEDALITBANG, BPKD
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)	1) Peningkatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui KIE secara formal dan informal											
			Peningkatan peran serta warga sekolah dalam Adiwiyata	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DINAS PERKIM LH & DINDIKBUD	BAPPEDALITBANG, DINKES, DPU TARU, DINPERINDAGKOP UKM

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			2) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat											
			a) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DINAS PERKIM LH & PMD P3A DAN PPKB	BAPPEDALITBANG, DPU TARU, DINKES,
			b) Pengendalian dampak perubahan iklim	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DINAS PERKIM LH & BAPPEDALITBANG	DINKES, DPU TARU, DINDIKBUD, DINPERINDAGKOP UKM
			3) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DINAS PERKIM LH & BAPPEDALITBANG	DINKES, DPU TARU, DINDIKBUD, DINPERINDAGKOP UKM

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis kawasan											
			Koordinasi penilaian kota sehat / adipura	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DINAS PERKIM LH	BAPPEDALITBANG, DINKES, DPU PR, DINDIKBUD
			4) Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran dan taman edukasi										DINAS PERKIM LH	BAPPEDALITBANG, DINKES, DPU TARU,
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DINAS PERKIM LH & DINDIKBUD	DPU TARU, DINKES, PMD P3A DAN PPKB, TIM PENGGERAK PKK KABUPATEN
		g. Penerapan dan pengembangan sistem intensif	1) Integrasi bank sampah menjadi UKM lingkungan hidup untuk mendapatkan KUR											

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		dan disinsentif dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	a) Peningkatan kinerja bank sampah menjadi UKM	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DINAS PERKIM LH & DINPERINDAGKOP UKM	BAPPEDALITBANG, DINKES, DPU TARU, PMD P3A DAN PPKB,	
			b) Pembentukan dan peningkatan Bumdes lingkungan	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DINAS PERKIM LH & PMD P3A DAN PPKB	BAPPEDALITBANG, DINKES, DPU TARU, ,DINPERINDAGKOP UKM ,	
			2) Penerapan sistem disinsentif untuk produsen yang tidak melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga												
			Tidak dilakukan pengangkutan, bila sampah tidak dipilah.	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DINAS PERKIM LH & BAG HUKUM, SATPOL PP	BAPPEDALITBANG, DINKES, DPU TARU, PMD P3A DAN PPKB ,DINPERINDAGKOP UKM

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			3) Penerapan sistem insentif untuk produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga											
			Penerapan Proper	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DINAS PERKIM LH & DINPERI NDAGKOP UKM,	BAPPEDALITBANG, DINKES, DPU TARU, SATPOL PP
			4) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah											

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Rumah Tangga											
			Pemberian bantuan sarpras pengelolaan sampah	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DINAS PERKIM LH & PMD P3A DAN PPKB	BAPPEDALITBANG, DINKES, DPU TARU, DINPERINDAGKOP UKM
			5) Penerapan sistem disinsentif bagi kelurahan yang tidak melakukan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat											
			Tidak diberi bantuan sarpras pengelolaan sampah	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DINAS PERKIM LH & PMD P3A DAN PPKB	BAPPEDALITBANG, DINKES, DPU TARU, DINPERINDAGKOP UKM, BAG HUKUM, SATPOL PP

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			6) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga											
			Pemberian bantuan sarpras pengelolaan sampah	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DINAS PERKIM LH	BAPPEDALITBANG, DINKES, DPU TARU, PMD P3A DAN PPKB
		h. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui	Pengembangan dan Penerapan kebijakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah, meliputi :											

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluhthahun an kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga pada sektor manufaktur	kegiatan		1							DINAS PERKIM LH & DINPERINDAGKOP UKM	BAPPEDALITBANG, DINKES, DPU TARU
			2) Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluhthahun an kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga pada sektor ritel	kegiatan	-	-	1	-	-	-	-	-	DINAS PERKIM LH & DINPERINDAGKOP UKM	BAPPEDALITBANG, DINKES, DPU TARU
		I Peningkatan sarana prasarana pengurangan sampah	1 Peningkatan sarpras pembatasan timbulan sampah											
			a) Pengadaan Bor biopori	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DINAS PERKIM LH	BAPPELITBANGDA BPKD

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			b) Pengadaan sarana edukasi (leaset, stiker, dll)	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DINAS PERKIM LH & DINDIKBUD	BAPPELDA , BPKD
			2 Peningkatan sarpras pemanfaatan sampah	kegiatan										
			a) Peningkatan sarpras bank sampah	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1		DINAS PERKIM LH	BAPPEDALITBANG , BPKD
			b) Peningkatan sarpras TPS, TPS3R	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DINAS PERKIM LH	BAPPEDALITBANG , BPKD
			3 Peningkatan sarpras daur ulang sampah	kegiatan									DINAS PERKIM LH	
			a) Peningkatan sarpras bank sampah	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1		DINAS PERKIM LH	BAPPEDALITBANG , BPKD
			b) Peningkatan sarpras pusat daur ulang / PDU sampah	kegiatan		1		1		1	1	1	DINAS PERKIM LH	BAPPEDALITBANG , BPKD
			c) Peningkatan sarpras rumah kompos	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DINAS PERKIM LH	BAPPEDALITBANG , BPKD
			d) peningkatan komposter	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1		DINAS PERKIM LH	BAPPEDALITBANG , BPKD

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Peningkatan kinerja penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	a. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	1) Penyusunan pedoman refuse derived fuel (RDF)											
			a) Studi Spesifikasi Sampah	dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	DINAS PERKIM LH	BAPPEDALITBANG, DINKES, DPU TARU, PMD P3A DAN PPKB , BPKD
			b) Study Financial Model Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Pengolahan Sampah (RDF)	dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	DINAS PERKIM LH, BAPPEDA LITBANG & BPKD	, DINKES, DPU TARU, PMD P3A DAN PPKB ,
			c) Study Kelayakan Kerja Sama Penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu RDF	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	DINAS PERKIM LH & BAPPEDALITBANG	DINKES, DPU TARU, PMD P3A DAN PPKB , BPKD
			2) Penyusunan standar sarana dan prasarana penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis											

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			sampah rumah tangga											
			a) Penyusunan dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah	dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	DINAS PERKIM LH & BAPPEDA LITBANG	DINKES, DPU TARU, PMD P3A DAN PPKB , BAGIAN HUKUM, SATPOL PP, DINKOMINFO
			b) Penyusunan dokumen sistem tanggap darurat pengelolaan sampah	dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	DINAS PERKIM LH & BPBD	BAPPEDALITBANG, DINKES, DPU TARU, PMD P3A DAN PPKB , BAGIAN HUKUM, SATPOL PP, DINKOMINFO
			3) Penyusunan standar retribusi jasa pelayanan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga										-	-
			a) Penyusunan Naskah akademik raperda pengelolaan sampah	dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Desa	1) Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam:											
			a) Kesepakatan bersama penyelenggaraan TPST RDF	dokumen	-	-	1	-	-	1	-	-	DINAS PERKIM LH BAPPEDA LITBANG	, DINKES, DPU TARU, DINKES, PMD P3A DAN PPKB, BAGIAN HUKUM, SATPOL PP, BAG TATA PEMERINTAHAN
			b) Penyediaan lahan	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	DINAS PERKIM LH	BAPPEDALITBANG, DINKES, DPU TARU, PMD P3A DAN PPKB, BAGIAN HUKUM, SATPOL PP, BAG TATA PEMERINTAHAN
			c) Pembinaan pemulung	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	DINAS PERKIM LH	BAPPEDALITBANG, DINKES, DPU TARU, PMD P3A DAN PPKB, BAGIAN HUKUM, SATPOL PP, DINKOMINFO

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			d) Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	DINAS PERKIM LH	BAPPEDALITBANG, BPKD
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan sampah rumah	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di pusat dan daerah serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DINAS PERKIM LH & DPRD/SETWAN	BAPPEDALITBANG, DINKES, DPU TARU, PMD P3A DAN PPKB, BAGIAN HUKUM, SATPOL PP, DINKOMINFO

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	di daerah											
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam upaya penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	1) Advokasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir kepada :											
			a) SKPD (lemtekda, kecamatan dan kelurahan)	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DINAS PERKIM LH & BAG HUKUM, SATPOL PP	BAPPEDALITBANG, DINKES, DPU TARU, DINKES, PMD P3A DAN PPKB ,
			b) Komunitas peduli sampah	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DINAS PERKIM LH	BAPPEDALITBANG, DINKES, DPU TARU, DINKES, PMD P3A DAN PPKB ,LSM

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			2) Pelaksanaan Training of Trainer penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DINAS PERKIM LH	BAPPEDALITBANG, DINKES, DPU TARU, DINKES, PMD P3A DAN PPKB
		e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring skala kabupaten data dasar sistem pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan operasionalisasi TPA yang diintegrasikan dengan IKPLHD di Kabupaten	jejaring	1	1	1	1	1	1	1	1	DINAS PERKIM LH	BAPPEDALITBANG, DINKES, DPU TARU
		f. Penguatan keterlibatan	1) Peningkatan penanganan Sampah Rumah	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DINAS PERKIM LH	BAPPEDALITBANG, DINKES, DPU TARU, DINKES,

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)	Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir											PMD P3A DAN PPKB
			2) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di masyarakat	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DINAS PERKIM LH	BAPPEDALITBANG, DINKES, DPU TARU, DINKES, PMD P3A DAN PPKB
			3) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di kawasan	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DINAS PERKIM LH	BAPPEDALITBANG, DINKES, DPU TARU, DINKES, PMD P3A DAN PPKB
			4) Pengembangan model pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui :											

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			a) Unit bank sampah di masyarakat	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DINAS PERKIM LH	BAPPEDALITBANG, DINKES, DPU TARU, DINKES, PMD P3A DAN PPKB ,DINPERINDAGKOP UKM
			b) Kawasan (TPS3R)	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DINAS PERKIM LH	BAPPEDALITBANG, DINKES, DPU TARU, DINKES, PMD P3A DAN PPKB ,DINPERINDAGKOP UKM
			c) Kelompok swadaya masyarakat / KSM	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DINAS PERKIM LH	BAPPEDALITBANG, DINKES, DPU TARU, DINKES, PMD P3A DAN PPKB ,DINPERINDAGKOP UKM
			5) Peningkatan kemauan membayar (<i>willingness to pay</i>) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga										DINAS PERKIM LH	BAPPEDALITBANG, DINKES, DPU TARU, DINKES, PMD P3A DAN PPKB ,DINPERINDAGKOP UKM

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Peningkatan nilai bayar jasa pelayanan pengelolaan sampah	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DINAS PERKIM LH	BAPPEDALITBANG, DINKES, DPU TARU, DINKES, PMD P3A DAN PPKB ,DINPERINDAGKOP UKM
		g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional dan pemeliharaan	1) Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui :										DINAS PERKIM LH	BAPPEDALITBANG, DINKES, DPU TARU, DINKES, PMD P3A DAN PPKB ,DINPERINDAGKOP UKM
			a) Peningkatan penyertaan modal BUMD dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan , pengangkutan, dan pemrosesan akhir	kegiatan		1	1	1	1	1	1	1	DINAS PERKIM LH & BAPPEDALITBANG	DINKES, DPU TARU, DINKES, PMD P3A DAN PPKB ,DINPERINDAGKOP UKM

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			b) Penerapan kerja sama pemkab dengan swasta	kegiatan		1	1	1	1	1	1	1	DINAS PERKIM LH & DINPERI NDAGKO P UKM	BAPPEDALITBANG, DINKES, DPU TARU, DINKES, PMD P3A DAN PPKB, DPMPTSP 7 NAKER
			c) Penerapan skema insentif atau kredit lunak untuk swasta yang berinvestasi dalam pembangunan dan operasionalisasi TPS, TPS3R dan TPA	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DINAS PERKIM LH & DINPERI NDAGKO P UKM	BAPPEDALITBANG, DINKES, DPU TARU, DINKES, PMD P3A DAN PPKB, DPMPTSP & NAKER, LEMBAGA KEUANGAN / PERBANK-AN
			2) Peningkatan peran pelaku usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DINAS PERKIM LH & DINPERI NDAGKO P UKM	BAPPEDALITBANG, DINKES, DPU TARU, DINKES, PMD P3A DAN PPKB, DPMPTSP 7 NAKER

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		h. Penguatan penegakan hukum	1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DINAS PERKIM LH & SATPOL PP	BAPPEDALITBANG, BAG HUKUM, DAN DPU TARU
			2) Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DINAS PERKIM LH & SATPOL PP	BAPPEDALITBANG, BAG HUKUM, DAN DPU TARU

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		i. Penguatan keterlibatan pelaku usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ke dalam lembaga perizinan terpadu satu pintu yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemrosesan akhir	Pengintegrasian pengurusan izin penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ke dalam lembaga perizinan terpadu satu pintu yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemrosesan akhir		1	1	1	1	1	1	1	1	DINAS PERKIM LH & DPMPST P & NAKER	BAPPEDALITBANG, DINKES, DPU TARU, DINKES, PMD P3A DAN PPKB
		j. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah	1) Pelaksanaan diseminasi informasi teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan,	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DINAS PERKIM LH & DINKOMINFO	BAPPEDALITBANG, DINKES, DPU TARU, DINKES, PMD P3A DAN PPKB

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir											
			2) Penelitian dan pengembangan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir				1					1	DINAS PERKIM LH & BAPPEDA LITBANG,	DINKES, DPU TARU, PMD P3A DAN PPKB ,
			3) Pembangunan penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi:											

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			a) Pembangunan sarana pengolahan sampah anorganik menjadi barang bernilai ekonomi	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DINAS PERKIM LH & DINPERINDAGKOP UKM	BAPPEDALITBANG, DINKES, DPU TARU, DINKES, PMD P3A DAN PPKB ,
			b) Pembangunan sarana pengolahan sampah organik menjadi pupuk dan pakan ternak (ketahanan pangan)	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DINAS PERKIM LH & DKPP	BAPPEDALITBANG, DINKES, DPU TARU, DINKES, PMD P3A DAN PPKB
			c) Penangkapan dan pemanfaatan gas metana menjadi sumber energi listrik di TPA	kegiatan		1	1	1	1	1	1	1	DINAS PERKIM LH	BAPPEDALITBANG, DINKES, DPU TARU, DINKES, PMD P3A DAN PPKB , DINPERINDAGKOP UKM
			d) Pemanfaatan sampah menjadi bahan bakar substitusi bahan bakar fosil atau RDF	Kegiatan					1				DINAS PERKIM LH	BAPPEDALITBANG, DINKES, DPU TARU, DINKES, PMD P3A DAN PPKB

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			4) Penerapan teknologi pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang ramah lingkungan menjadi energi terbarukan	kegiatan			1	1	1	1	1	1	DINAS PERKIM LH	BAPPEDALITBANG, DINKES, DPU TARU, DINKES, PMD P3A DAN PPKB
		k Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Pembentukan mekanisme dan sistem insentif dan disinsentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	kegiatan			1	1	1	1	1	1	DINAS PERKIM LH	BAPPEDALITBANG, DINKES, DPU TARU, DINKES, PMD P3A DAN PPKB
			2) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan	kegiatan			1	1	1	1	1	1	DINAS PERKIM LH	BAPPEDALITBANG, DINKES, DPU TARU, DINKES, PMD P3A DAN PPKB

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat											
			3) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN yang tidak melakukan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat	kegiatan			1	1	1	1	1	1	DINAS PERKIM LH & PMD P3A DAN PPKB	BAPPEDALITBANG, DINKES, DPU TARU, DINKES,
			4) Pembentukan dan penerapan sistem insentif bagi pengelola kawasan yang melakukan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DINAS PERKIM LH	BAPPEDALITBANG, DINKES, DPU TARU, DINKES, PMD P3A DAN PPKB

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			pengangkutan											
			5) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi pengelola kawasan yang tidak melakukan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan	kegiatan			1	1	1	1	1	1	DINAS PERKIM LH	BAPPEDALITBANG, DINKES, DPU TARU, DINKES, PMD P3A DAN PPKB
		i. Peningkatan sarana prasarana penanganan sampah	1) Peningkatan sarpras pewadah sampah											
			a) Peningkatan alat-alat kebersihan	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DINAS PERKIM LH	BAPPELITBANGDA, BPKD
			b) Peningkatan pewadah/tempat sampah pemilahan	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DINAS PERKIM LH	BAPPELITBANGDA, BPKD

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			2) Peningkatan sarana pengumpul sampah	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DINAS PERKIM LH	BAPPEDALITBAN G, BPKD
			a) Pengadaan gerobag sampah	kegiatan		1		1		1		1	DINAS PERKIM LH	BAPPEDALITBAN G, BPKD
			b) Peningkatan becak sampah	kegiatan	1		1		1		1		DINAS PERKIM LH	BAPPEDALITBAN G, BPKD
			c) Peningkatan motor roda tiga	kegiatan	1	1		1		1		1	DINAS PERKIM LH	BAPPEDALITBAN G, BPKD
			3) Peningkatan sarana pengolahan sampah menjadi bahan baku	kegiatan									DINAS PERKIM LH	BAPPEDALITBAN G, BPKD
			a) Peningkatan pusat daur ulang /PDU sampah	kegiatan		1		1		1		1	DINAS PERKIM LH	BAPPEDALITBAN G, BPKD
			b) TPST	kegiatan			1		1		1		DINAS PERKIM LH	BAPPEDALITBAN G, BPKD
			4) Peningkatan sarana pemanfaatan sampah menjadi energi	kegiatan									DINAS PERKIM LH	BAPPEDALITBAN G, BPKD
			peningkatan sarana biodigester	kegiatan		1	1	1	1	1	1	1	DINAS PERKIM LH	BAPPEDALITBAN G, BPKD
			5) Peningkatan sarana pengangkut	kegiatan									DINAS PERKIM LH	BAPPEDALITBAN G, BPKD

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			sampah											
			a) Peningkatan arm roll	kegiatan			1	1	1		1	1	DINAS PERKIM LH	BAPPEDALITBANG, BPKD
			b) Peningkatan dump Truck	kegiatan			1	1	1		1	1	DINAS PERKIM LH	BAPPEDALITBANG, BPKD
			6) Peningkatan sarana pemrosesan akhir	kegiatan									DINAS PERKIM LH	BAPPEDALITBANG, BPKD
			a) Pembangunan TPA Baru;	kegiatan	-	-	-	-	1	-	-	-	DINAS PERKIM LH, KLHK, KEMEN PUPR	BAPPEDALITBANG, BPKD, DLHK PROV JATENG
			b) Peningkatan fasilitas dasar;	kegiatan	1	1	1	1	1				DINAS PERKIM LH	BAPPEDALITBANG, BPKD
			c) Peningkatan fasilitas perlindungan lingkungan;	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DINAS PERKIM LH	BAPPEDALITBANG, BPKD
			d) Peningkatan fasilitas operasional; dan	kegiatan				1	1	1	1	1	DINAS PERKIM LH	BAPPEDALITBANG, BPKD
			e) Peningkatan fasilitas penunjang.	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DINAS PERKIM LH	BAPPEDALITBANG, BPKD

BUPATI PEKALONGAN,
ttd
ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 22 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2018 NOMOR 45

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



AGUS PRANOTO, SH, MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670914 199703 1 005